



## DPRD PESAWARAN SAHKAN 9 RAPERDA



DPRD Kabupaten Pesawaran mengesahkan sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda). Empat diantaranya merupakan inisiatif dewan, dan lima lainnya merupakan usulan eksekutif.

Adapun sembilan raperda tersebut diantaranya Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

Kemudian, Raperda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Pesawaran, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata.

Lalu, Raperda tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD, M Nasir dan Wakil Bupati Eriwan.

"Kita patut bersyukur dimana rancangan peraturan daerah tersebut telah dibahas oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Perda dengan kajian hukum secara formal, serta memperhatikan aspek landasan hukum yang mendasarinya, sehingga salah satu tugas pemerintahan di Kabupaten Pesawaran ini telah dapat kita laksanakan dengan baik," kata Wakil Bupati Pesawaran, Eriwan.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada DPRD Pesawaran yang telah menyetujui 9 Raperda yang

diajukan tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota dewan yang terhormat, terutama pada Ketua dan anggota badan pembentukan perda yang telah berupaya secara maksimal dengan segala kemampuan dan kesungguhan, dalam membahas rancangan peraturan daerah tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, pada masa yang akan datang masih banyak tugas-tugas di bidang regulasi yang harus diselesaikan. Oleh karena itu ia meminta khususnya kepada

kepala satuan kerja terkait agar dapat memprioritaskan raperda yang akan diterbitkan.

Dengan telah selesainya pembahasan dan disetujuinya raperda tersebut, lanjut dia, tentunya akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, guna meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap masyarakat. "Perda yang telah ditetapkan hendaknya bukan berdasarkan kuantitas, tetapi lebih ditujukan pada kualitasnya, sehingga perda tersebut dapat berlaku secara efektif dan tepat sasaran," pesannya. (Adv)

